

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan UU no. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan diberikannya wewenang yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, maka pengelolaan pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat. Informasi merupakan salah satu hal yang paling banyak dicari oleh masyarakat khususnya informasi tentang pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat atas pengelolaan pemerintah daerah yang telah dilakukan selama ini.

Masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan ingin mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengatur daerahnya dan apakah pengelola melaksanakan tugas dan amanat yang telah diberikan kepada mereka secara bertanggung jawab. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai kondisi daerah baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatutur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah. Kualitas informasi pemerintah daerah yang dihasilkan ini penting menuju terwujudnya *good governance*. Menurut Rora Puspita dan Martani (2012), informasi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan pemda seharusnya disampaikan kepada publik melalui media sehingga rakyat dapat mengaksesnya. Hal ini didukung dengan adanya

undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.

Berdasarkan UU tersebut, pemerintah bisa memanfaatkan media internet untuk mempublikasikan informasi keuangan pemerintah daerah karena teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini sudah semakin berkembang dan mudah diakses oleh siapapun. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah berkembang begitu pesat yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi, sehingga menempatkan suatu negara pada kedudukan sejauh mana negara tersebut maju didasarkan atas seberapa jauh negara itu menguasai bidang teknologi komunikasi dan informasi. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang hidup dalam lingkungan global, maka keterlibatan dalam kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi adalah hal yang sangat penting, khususnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia sendiri. Untuk mencapai maksud tersebut pemerintah menuangkannya dalam salah satu bentuk dari tujuan dan arah Pembangunan Nasional, yaitu sektor/bidang ilmu pengetahuan teknologi.

Pemublikasian informasi keuangan melalui internet telah lebih dahulu dilakukan oleh perusahaan swasta agar dapat meningkatkan ketersediaan laporan informasi keuangan perusahaan bagi pengguna informasi secara cepat. Jika pemerintah juga menggunakan internet sebagai

sarana publikasian informasi keuangan pemerintah daerah, maka masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses dan mengetahui informasi keuangan pemerintah daerah. Pemerintah yang melakukan publikasian informasi keuangan di *website* resmi pemerintah daerah itu menunjukkan bahwa pemerintah melakukan transparansi informasi keuangan kepada masyarakat.

Transparansi merupakan persyaratan akuntabilitas administratif kepada publik yang menjadi elemen kunci *governance*, berupa jaminan akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintah termasuk pengelolaan keuangan publik (Medina, 2012). Suatu pemerintahan daerah dengan kepala daerah yang menjunjung transparansi dapat dilihat dari ada atau tidaknya informasi keuangan yang tersedia secara terbuka bagi masyarakat dan pengguna lainnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, transparansi dapat menjadi indikator adanya kelola keuangan yang baik (Sinaga, 2011). Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting karena ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Salah satu bentuk transparansi informasi keuangan pemda berupa mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah di internet agar informasi tersebut mudah dan cepat diakses oleh penggunanya.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor tengah mengalami

perubahan. Begitu juga pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui *e-Government*. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dieliminir melalui pemanfaatan *e-Government* menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna. *E-Government* menawarkan pelayanan publik bisa diakses secara 24 jam, kapan pun, dan dari manapun pengguna berada. *E-Government* juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara *face-to-face* sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.

Penggunaan internet di Indonesia akan sangat membantu menyukseskan program *e-Governance* dalam membangun sistem informasi keuangan daerah. Internet menjadi teknologi yang berperan dalam proses penyediaan dan transfer informasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan kepada pihak lain, misalnya warga masyarakat, ataupun sebaliknya. Pemanfaatan internet dalam suatu institusi dapat membuat pekerjaan semakin efektif dan efisien (Medina, 2012). Menyadari akan besarnya manfaat *e-Government*, pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang penerapan *e-Government*. Salah satu media yang sangat mudah digunakan untuk penyebarluasan informasi kegiatan pemda ini adalah melalui *website* resmi pemda. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) juga telah mengeluarkan panduan penyelenggaraan *website* pemda dan *blueprint* implementasi aplikasi *e-Government* pemda di Indonesia. Kemudian

peraturan lebih lanjut melalui peraturan Menkominfo No. 26 tahun 2006 tentang penggunaan nama domain *go.id* untuk *website* resmi pemerintah pusat maupun daerah.

Banyak pemerintah daerah yang belum menggunakan *website* secara optimal baik dari segi informasi keuangannya maupun non keuangan. Adapun beberapa pemda yang sudah memanfaatkan *website* namun sangat jarang dilakukannya publikasian informasi keuangan dalam *website* tersebut, yang terjadi hanya pengungkapan mengenai Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) saja yang banyak diungkap tetapi jarang untuk sampai laporan keuangannya, sedangkan tanggung jawab pemerintah daerah sangat besar dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak.

Penelitian terkait dengan pengungkapan informasi di sektor pemerintah daerah masih jarang diteliti dikarenakan sulit untuk mendapatkan data berbeda dengan di sektor privat dimana sudah sering dilakukannya penelitian tentang pengungkapan baik *mandatory disclosure* maupun *voluntary disclosure*. Apa yang terjadi dipemerintahan Indonesia sekarang sangatlah kompleks karena hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia sudah tidak percaya dengan pemerintah karena berbagai macam hal yang terjadi di Indonesia seperti korupsi.

Adanya aturan dan dukungan pemerintah pusat untuk mengembangkan *website* pemda dan meningkatnya kebutuhan publik akan transparansi, sudah semestinya pemerintah daerah semakin sering menggunakan *website* resminya sebagai sarana untuk menyebarluaskan

informasi kepada publik. Namun, pemerintah daerah di Indonesia dalam penggunaan *websitenya* banyak yang belum maksimal serta banyak pemerintah daerah yang belum mengungkapkan informasi laporan keuangan pemerintah daerahnya.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah, hasil penelitian oleh Puspita dan Martani (2012) menunjukkan ukuran pemerintahan daerah berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Begitu juga dengan hasil penelitian Trisnawati dan Achmad (2014), melakukan penelitian terhadap variabel ukuran pemerintah daerah, Suatu pemda yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga pemda akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar. Pemda yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya, sehingga semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi. Pengawasan dan kebutuhan pelaporan yang lebih besar oleh pemda yang berukuran besar, menyebabkan pemda harus menanggung biaya pengawasan dan biaya pelaporan yang lebih tinggi. Internet merupakan media yang paling efektif bagi pemda dalam mempublikasikan laporan keuangan dalam rangka pelaksanaan transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Sedangkan hasil penelitian lain oleh Sinaga (2011) menunjukkan ukuran pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.

Penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses-proses demografi yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Proses kelahiran dan kematian tidak terjadi secara serentak di setiap daerah. Begitu juga dengan perpindahan, proses-proses demografi tersebut yang menyebabkan jumlah penduduk di setiap daerah berbeda. Jumlah penduduk yang berbeda memiliki permintaan informasi yang berbeda. Sesuai dengan *Stakeholder Theory*, penduduk merupakan salah satu stakeholder terpenting Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah penduduk maka tekanan untuk meminta informasi juga semakin besar (Andriani, 2015). Jumlah penduduk berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2008) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan.

Level ekonomi dalam masyarakat daerah dapat mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan oleh pemerintah daerah. Perekonomian masyarakat setempat juga mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat. Perekonomian masyarakat setempat juga mempengaruhi teknologi yang diadaptasi oleh masyarakat tersebut. Sehingga, pengungkapan laporan keuangan di internet pun bisa menjadi terpengaruh oleh pendapatan perkapita daerah tersebut (Hudoyo dan Mahmud, 2014).

Tipe pemerintah daerah juga berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet (Trisnawati dan Achmad, 2014). Tipe

pemerintahan, yaitu pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten, memiliki komposisi penduduk yang beragam. Penduduk di pemerintahan kabupaten umumnya melakukan urbanisasi sehingga populasi penduduk di pemerintahan kabupaten lebih homogen dibandingkan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota (Sinaga, 2011). Hasil penelitian Sinaga (2011) menunjukkan bahwa tipe pemerintahan kabupaten secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Namun, penelitian Rahman dkk., (2013) tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara tipe pemda dengan pelaporan keuangan pemda melalui internet.

Opini audit yang merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemda diduga berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Semakin tinggi penyimpangan dalam laporan keuangan pemda akan mendorong pemda untuk menutupi informasi yang dimiliki, sehingga tingkat pengungkapan laporan keuangan menjadi rendah (Handayani, 2010; Trisnawati dan Achmad, 2014). Opini Audit mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat pengungkapan informasi di *website* pemda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ratmono (2013) memberikan bukti empiris bahwa pemda yang memperoleh penghargaan dari organisasi eksternal atas praktek keuangan yang baik, cenderung menyajikan laporan keuangannya di internet. Sehingga hal ini menarik untuk dilakukan penelitian kembali dimana opini audit ini digunakan sebagai salah satu

variabel independen dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Ratmono (2013) menunjukkan jika opini audit tidak berpengaruh.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan masih belum konsisten hasilnya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk itu, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk menambah referensi mengenai Determinan Publikasi Laporan Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah secara Sukarela di Indonesia.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Trisnawati dan Achmad (2014). Namun penelitian ini terdapat perbedaan dalam hal tahun pelaporan, sample yang diambil dan terdapat variabel yang di hapus dan ada variabel diganti dari peneliti yang lain. Penelitian ini menghapus variabel kompetisi politik karena teori dan logika kompetisi politik berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet tidak cukup kuat untuk membangun hipotesis, lalu menghapus variabel pembiayaan utang (*Leverage*) dan menggantikannya dengan Pendapatan Perkapita karena pada dasarnya pada pemerintahan sudah ada anggaran yang disediakan untuk semua kegiatan dan pembiayaan oleh karena itu variabel pembiayaan utang tidaklah bisa dikembangkan logika hipotesisnya, dan menghapus variabel Kekayaan Pemda serta menggantikannya dengan Jumlah Penduduk karena logika yang digunakan untuk Kekayaan Pemda dan Ukuran Pemda sama. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemda yang memiliki situs resmi telah mengungkapkan informasi keuangan, pelayanan dan informasi lainnya dalam

situs resmi pemda, sehingga informasi tersebut dapat digunakan secara baik oleh para pengakses situs pemda.

B. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah yang diteliti yaitu ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, pendapatan perkapita, tipe pemerintah daerah dan opini audit. Situs resmi pemerintah provinsi tidak dimasukkan kedalam pengamatan penelitian. Laporan keuangan pemerintah daerah yang diteliti adalah yang telah diaudit tahun 2013.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah?
3. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah?
4. Apakah tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah?
5. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintahan daerah terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita daerah terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak seperti berikut ini :

1. Bagi Publik

Hasil dari penelitian bisa digunakan sebagai dasar informasi dalam pengambilan keputusan ekonomis terkait investasi dan kredit yang dilakukan pihak eksternal/masyarakat dengan informasi keuangan dan non keuangan yang diperoleh.

2. Bagi Pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi keuangan dan informasi non

keuangannya dalam *website* resmi pemda sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengakses *website* resmi pemda, serta penelitian ini menjadi acuan agar pemerintah daerah di Indonesia lebih mudah mengungkapkan informasi daerah sehingga terjadi transparansi dan akuntabilitas antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta juga dapat dijadikan sebagai bahan penilaian implementasi dan pengembangan kebijakan untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.